

DAFTAR PUSTAKA

• Buku

- Agus Dwiyanto. (2023). *Good Governance*. (n.p.): CV. Dewa Publishing.
- Sedarmayanti. (2003). *Good governance (kepemerintahan yang baik) dalam rangka otonomi daerah: Upaya membangun organisasi efektif dan efisien melalui restrukturisasi dan pemberdayaan*. Indonesia: Mandar Maju.
- Mardiasmo, M. B. A. (2016). *Perpajakan–Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Agus Dwiyanto. (2021). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. (n.p.): UGM PRESS.
- Anton Mardoni. (2021). *Pajak Bumi dan Bangunan Area Perdesaan dan Perkotaan: Tinjauan Implementasi Kebijakan Perspektif Ilmu Administrasi*. (n.p.): Scopindo Media Pustaka.
- Damas Dwi Anggoro. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (n.p.): Universitas Brawijaya Press.
- Suparmono. (2010). *Perpajakan Indonesia, Mekanisme Perhitungan*. Indonesia: Penerbit Andi.
- Damas Dwi Anggoro. (2019). *Rekonstruksi Pajak Properti*. (n.p.): Universitas Brawijaya Press.
- Siahaan, M. P. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

• Jurnal

- Amris, M. M. (2019). Analisis Manajemen Pengelolaan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 1(2), 17–34.
- Apriliani, V. (2018). Definisi Good Governance. *Journal of Physical Therapy Science*, 9(1), 1–11.
- Aryani, M. D. S. (2021). Partisipasi Masyarakat, Kompetensi, Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul. *Jurnal Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2(2013), 1–23.
- Aswir, & Misbah, H. (2018). BAB III Rancangan Penelitian. *Repository STIE PGRI Dewantara Jombang*, 2(1), 1–13.
- Cahyadi, A., & Soenarjanto, B. (2018). Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(1), 947–952.

- Endah, K. (2018). Etika pemerintahan dalam pelayanan publik. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 141–151.
- Endah, K., & Vestikowati, E. (2021). Birokrasi Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal MODERAT*, 7(3), 648.
- Erin Marlina. (2019). Bab II Sistem pengendalian manajemen Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta. *Administrasi Publik*, 3(1), 11–45.
- Febriani, P. wahyu. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pagerejo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Tahun 2016. *Jurnal Ilmu Sosial*, 1(2), 1–65.
- Handayani. (2020). Bab III Metode Penelitian. *Journal Universitas Pembangunan Jaya*, 5(3), 248–253.
- Herman Hanafi. (2023). Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026. *Badan Pendapatan Daerah*, 2(3), 1–53.
- Hirawan, Z., Nurasiatin, D., Pustaka, S., & Pembayaran, A. (2023). Mekanisme Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Subang. *Ejournal.Unsub.Ac.Id*, 5(1), 1–16.
- Kriyantono, R. (2020). Teknik praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif. *Jakarta: Prenadamedia Group*, 1(2), 1–30.
- Mahendra, A. T. (2021). Persepsi Terhadap Pemanfaatan Fasilitas Perpustakaan. *Jurnal Pendidikan*, 12(1), 13–36.
- Mardiasmo. (2018). Prinsip-Prinsip Good Governance. *Bab II Tinjauan Pustaka*, 2(1), 10–58.
- Moleong. (2022). Persepsi Generasi Z Terhadap Pemberitaan Homeless Media Nuice Media dan Opini.Id di Media Sosial, Roberdy Giobriandi, Universitas Multimedia Nusantara. *Journal Multimedia*, 1(2), 34–47.
- Mutia, G. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Bandung. *Jurnal Unikom*, 1(2), 1–23.
- Nasrun, M., & Adil, M. (2022). Analisis Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Makassar. *Journal of Management*, 5(3), 749–761.
- Nur, F., & Dewi, C. (2022). Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pembangunan Dan Perdesaan Dan Perkotaan Melalui Website Sempel PBB. (*Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum UNY*), *Yogyakarta Indonesia*, 11(05), 1–14.
- Oktaviano, B., Djabatnicka, E. W., & Wulandari, T. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bekasi

- Tahun 2016-2019. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, Vol 7(No 2), 140–157.
- Patton. (2013). *Bab III metodologi penelitian*. 2(1), 33–47.
- Puji Lestari, U. (2023). Pengaruh Kompensasi Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu*, 9(1), 2021.
- Pundi, J., Wulandari, W., Septrizola, W., & Padang, U. N. (2021). Celebrity Endorsement and Purchase Intentions : The Role Of Trust , Attractiveness , Suitability Product. *Journal Faculty of Economic*, 05(02), 281–288.
- Rivaldi, M. (2018). Studi Etnomatematika Masyarakat Kampung Salapan Kabupaten Karawang. *Universitas Pendidikan Indonesia*, 1(3), 1–17.
- Robbins. (2003). BAB II Landasan Teori, Pengertian persepsi. *Jurnal Ilmiah*, 1(2), 1–160.
- Sugiyono. (2018). Bab III Metodologi Penelitian. *Jurnal Ilmiah Metode*, 2(1), 20–32. [http://repository.unpas.ac.id/32645/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/32645/5/BAB%20III.pdf)
- Sugiyono. (2019). Bab Iii Metode Penelitian. *Administrasi*, 5(3), 193–456.
- Suparyanto dan Rosad. (2020). Pengelolaan Informasi Melalui Branding Konsumen di Kabupaten Bantul. *Journal Karya Ilmiah*, 5(3), 16.
- Syamsuddin. (2009). METODOLOGI PENELITIAN. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 19(19), 175.
- Yesi. (2022). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Di Kelurahan Kalia Lia. *Jurnal Ekonomi*, 1(1), 1–67.
- Zulaikha, S. (2016). Teori Pengelolaan dalam universitas pertahana RI. *Revista Brasileira de Ergonomia*, 9(2), 10.

• Skripsi

- Febriani, P. wahyu. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pagerejo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Tahun 2016.
- Yesi. (2022). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Di Kelurahan Kalia Lia. *Jurnal Ekonomi*, 1(1), 1–67.

- **Produk Hukum**

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Bupati Bekasi Nomor: 12 Tahun 2023 Tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tingkat Kecamatan, Kelurahan Dan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Rencana Strategis Tahun 2023-2024.